

BAB II
AKAD *KAFĀLAH*, '*UJRAH*, DAN PEMBIAYAAN *TAKE OVER* MENURUT
HUKUM ISLAM

AKAD KAFĀLAH, 'UJRAH, DAN PEMBIAYAAN TAKE OVER MENURUT HUKUM ISLAM

A. Akad *Kafālah*

1. Pengertian *Kafālah*

Dalam pengertian bahasa, *kafālah* berarti *ad-ḍammu* yaitu menggabungkan. *Kafālah* juga disebut *ḍaman* berarti jaminan, *hamālah* yaitu beban, dan *za'āmah* yang berarti tanggungan.¹

Firman Allah Q.S Ali Imran ayat 37 :

..وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا..

“Dan Dia (Allah) menjadikan Zakaria sebagai penjaminnya (Maryam).”²

Menurut Mazhab Hanafi, *kafālah* memiliki dua pengertian, yang pertama yakni :

ضُمَّ ذِمَّةٌ إِلَى ذِمَّةٍ فِي الْمُطَا لَبَةِ بِنَفْسٍ أَوْ دَيْنٍ أَوْ عَيْنٍ

“Menggabungkan *dhimmah* kepada *dhimmah* yang lain dalam penagihan, dengan jiwa, zat atau benda.”

Pengertian *kafālah* yang kedua ialah :

ضَمُّ ذِمَّةٍ إِلَى ذِمَّةٍ فِي أَصْلِ الدِّينِ

¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Terj. Kamaluddin A. Marzuki jilid 14 (Bandung: Al-Ma'arif, 1998), 157.

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Indah Press, 1994), 81.

Menurut Mazhab Maliki, *kafālah* adalah :

“Orang yang mempunyai hak mengerjakan tanggungan pemberi beban serta bebannya sendiri yang disatukan, baik menanggung pekerjaan yang sesuai (sama) maupun pekerjaan yang berbeda.”³

الْتِزَامٌ وَحَبٌّ عَلَى الْغَيْرِ مَعَ بَقَايِهِ عَلَى الْمَضْمُونِ أَوِ الْتِزَامٌ إِحْضَارِ مَنْ عَلَيْهِ حَقٌّ مَا لِي لِصَا
حِبُّ الْحَقِّ

Sedangkan menurut Mazhab Syafi'i, *kafālah* merupakan :

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'āmalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 187.

utang kepada seorang debitur, yang mana pihak penjamin memberikan jaminan bahwa utang yang dilakukan oleh debitur kepada kreditur akan dilunasi oleh penjamin bila debitur wanprestasi.⁷

Dalam pengertian yang lain, *kafālah* juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin.⁸

Dari beberapa pengertian yang telah dijelaskan diatas, pengertian *kafālāh* secara umum adalah jaminan, yaitu jaminan yang diberikan oleh pihak penjamin (*kafil*) kepada pihak ketiga (*makfūl lahu*) untuk memenuhi kewajiban pihak yang dijamin (*makfūl ‘anhu*), obyek jaminan tersebut dapat berupa hutang maupun pekerjaan.

2. Dasar Hukum *Kafālah*

Kafālah disyari'atkan dalam Al-Qur'an, Al-Hadis, maupun ijma'.

Dasar hukum *kafālah* dalam Al-Qur'an, Allah SWT berfirman :

قَالُوا نَفَقْدُ صَوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

“Penyeru-penyeru itu berkata: “Kami kehilangan piala Raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya” (Q.S Yusuf ayat 72)⁹

⁷ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), 201.

⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 12.

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*,360.

- 3) Rela dengan akad *kafālah* yang dilakukan dengan *kafil*.¹⁵
- c. *Makfūl lahu*, yaitu pihak ketiga yang berpiutang kepada *makfūl ‘anhu*, syaratnya :
- 1) Bahwa yang berpiutang diketahui identitasnya oleh penjamin.
 - 2) Dapat hadir pada waktu akad atau memberikan kuasa.
 - 3) Serta berakal sehat.
- d. *Makfūl bih*, adalah hutang, barang, maupun pekerjaan yang dapat ditanggung oleh penjamin. Disyaratkan antara lain :
- 1) Merupakan tanggungan pihak/orang yang berutang, baik berupa uang, benda maupun pekerjaan.
 - 2) Dapat dilaksanakan oleh penjamin.
 - 3) Merupakan piutang mengikat (lazim) yang tidak mungkin hapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan.
 - 4) Jelas nilai, jumlah dan spesifikasinya.
 - 5) Tidak bertentangan dengan syari’ah, (bukan sesuatu yang diharamkan).¹⁶
- e. *Ṣighah*, yaitu *Ijab* dan *Qabul*. Yang disyaratkan harus jelas, mengandung makna jaminannya, serta dapat dimengerti oleh pihak yang bersangkutan dan mengikat.¹⁷

¹⁵ Fatwa DSN No.11/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Kafālah*.

¹⁶ Fatwa DSN No.11/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Kafālah*.

¹⁷ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam...*, 263.

- 1) *Kafālah bi ad-dain*, yaitu kewajiban membayar hutang yang menjadi tanggungan orang lain. *Kafālah* ini didasari hadis :

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ ... فَقَالَ هَلْ تَرَكَ شَيْئًا قَالُوا لَا قَالَ فَهَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ قَالُوا ثَلَاثَةٌ دَنَانِيرَ قَلْ صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ قَالَ أَبُو قَتَادَةَ صَلَّى عَلَيْهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَى دَيْنِهِ فَصَلُّوا عَلَيْهِ.

“Telah dihadapkan kepada Rasulullah SAW. (mayat seorang laki-laki untuk dishalatkan)... Rasulullah SAW bertanya “Apakah dia mempunyai warisan?” Para sahabat menjawab, “Tidak”. Rasulullah bertanya lagi, “Apakah dia mempunyai utang?” Sahabat menjawab “Ya, sejumlah tiga dinar.” Rasulullah pun menyuruh para sahabat untuk menshalatkannya (tetapi beliau sendiri tidak). Abu Qatadah lalu berkata, “Saya menjamin utangnya, ya Rasulullah.” Maka Rasulullah pun menshalatkan mayat tersebut.” (HR. Bukhari)²⁰

1) *Kafālah bi at-Taslim*

Jenis *kafālah* ini biasa dilakukan untuk menjamin pengembalian atas barang yang disewa, pada waktu masa sewa berakhir. Jenis pemberian jaminan ini dapat dilaksanakan oleh bank untuk kepentingan nasabahnya dalam bentuk kerjasama dengan perusahaan penyewaan (*leasing company*). Jaminan pembayaran bagi bank dapat berupa deposito atau tabungan dan bank dapat membebaskan uang jasa (*fee*) kepada nasabah itu.

2) *Kafālah al-Munjazah*

Kafālah al-Munjazah adalah jaminan mutlak yang tidak dibatasi oleh jangka waktu untuk kepentingan atau tujuan tertentu. Salah satu bentuk *kafālah al-munjazah* adalah pemberian jaminan dalam bentuk *performance bonds* (jaminan prestasi).

3) *Kafālah al-Muallaqah*

Bentuk jaminan ini merupakan penyederhanaan dari *kafālah al-munjazah*, baik oleh industri perbankan maupun asuransi.²³

²³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Perbankan Syari'ah...*, 124.

diketahui itu tidak sah untuk dijadikan upah. Upah atau ongkos sewa adalah untuk membayar manfaat yang diterima oleh penyewa, dan ongkos sewa tersebut harus ditentukan sedikit banyaknya, kalau ongkos sewanya tidak ditentukan berarti mengandung penipuan.²⁷

Menurut Abu Hanifah, diharuskan mengetahui tempat pelunasan upah jika upah itu termasuk barang yang perlu dibawa dan membutuhkan biaya.²⁸

- b. Tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari *ijārah*, seperti upah menyewa rumah untuk ditempati dengan menempati rumah tersebut.²⁹

3. 'Ujrah dalam Akad *Kafālah*

Dalam ruang lingkup perbankan syari'ah, *'ujrah* atau upah juga digunakan. Istilah ini sering disebut dengan *fee*. Pada umumnya, *'ujrah* atau *fee* ini diperoleh dari akad-akad yang berjenis jasa, seperti *kafālah*, *hiwālah*, *wakālah*, dan lain-lain. Seperti dalam akad *kafālah*, oleh perbankan syari'ah pada umumnya digunakan untuk produk

²⁷ Al-Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar 2*, Terj. Achmad Zaidun dan A. Ma'ruf Asrori (Surabaya: Bina Ilmu, 1995), 187.

²⁸ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islāmy...*, 400.

²⁹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Mu'āmalah*...129.

Bank Garansi, dimana yakni jasa yang diberikan Lembaga Keuangan Syari'ah dalam rangka memberi jaminan kepada nasabah.³⁰

Akad *kafālah* sejatinya adalah akad *tabarru'* (tolong menolong), pihak *kafil* mendapatkan pahala atas penjaminan yang diberikannya. Oleh karena itu, yang lebih utama tentunya adalah hendaknya akad *kafālah* tetap dijaga kemurniannya sebagai akad *tabarru'*, tanpa imbalan atau kompensasi. Karena dengan begitulah pihak *kafil* bisa lebih terjauhkan dan terjaga dari kecurigaan yang tidak baik. Seandainya pihak *makfūl lahu* memberikan imbalan kepada *kafil* dalam bentuk hibah atau hadiah, maka itu boleh.

Selain itu, *'ujrah* yang diberikan atas jasa akad *kafālah* diperbolehkan apabila *makfūl lahu* tidak menemukan orang lain yang bersedia membantu tanpa upah. Dalam situasi yang mendesak seperti ini diperbolehkan. Namun, dalam hal persyaratan adanya *'ujrah* tersebut, harus tetap diperhatikan bahwa pengambilan *'ujrah* tidak boleh bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang berlebihan. Sebagaimana pula biaya yang dibebankan pada nasabah sebagai *'ujrah* atas jasa perealisasi an akad *kafālah*.³¹

³⁰ Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam* (Jakarta: Kencana, 2013), 266.

³¹ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islāmy...*, 75-76.

C. Pembiayaan *Take Over* (Pengalihan Hutang)

1. *Hiwālah*

Dalam fiqh, *take over* atau pengalihan hutang disebut dengan *hiwālah*. Menurut bahasa, yang dimaksud dengan *hiwālah* adalah *al-intiqāl* dan *al-tahwīl* yang berarti perpindahan.

Menurut Hanafiyah, yang dimaksud dengan *hiwālah* ialah :

نَقْلُ الْمَطَالِبَةِ مِنْ ذِمَّةِ الْمَدْيُونِ إِلَى ذِمَّةِ الْمُتَرَمِّمِ

“Memindahkan tagihan dari tanggung jawab yang berutang kepada yang lain yang punya tanggung jawab kewajiban pula.”³²

Pengertian *hiwālah* menurut ulama Hanafiyah memiliki dua versi:

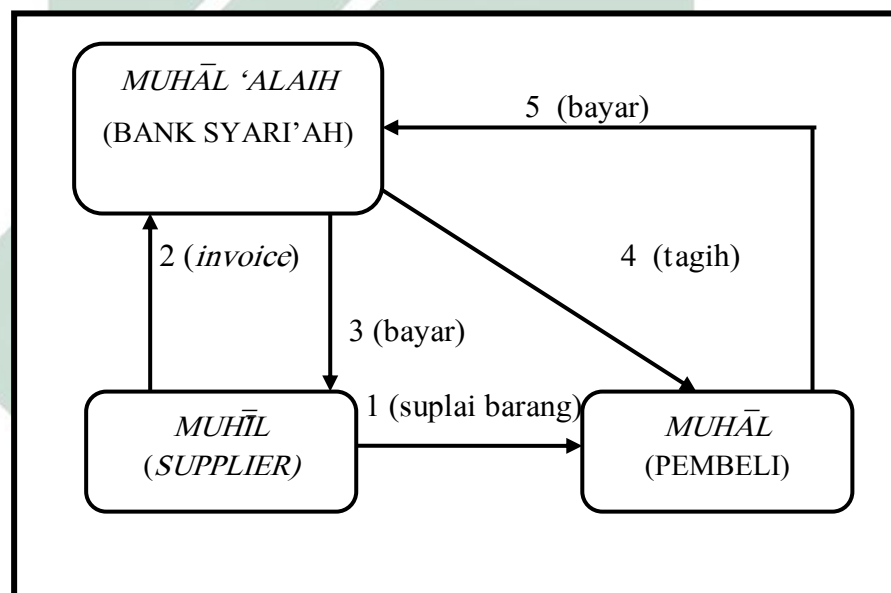
- a. Pertama, pemindahan hak menuntut hutang dari pihak yang berhutang kepada pihak lain dimana pihak lain secara kebetulan memiliki hutang kepada yang berhutang. *Hiwālah* ini disebut *hiwālah al-haq*.
- b. Kedua, pemindahan penagihan dan pemindahan hutang sekaligus, artinya pemindahan tanggung jawab pihak yang berhutang kepada pihak lain melalui persetujuan pihak-pihak yang berkepentingan . *hiwālah* seperti ini disebut *hiwālah* hutang.³³

³² Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syari'ah di Indonesia* (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2012), 188.

³³ Atang Abd. Hakim, *Fiqh Perbankan Syari'ah (Transformasi Fiqih Mu'amalah kedalam Peraturan Perundang-Undangan)* (Bandung: Refika Aditama, 2011), 283.

2) *Hiwālāh al-mutlāqah*, yaitu pemindahan hutang yang tidak ditegaskan sebagai ganti rugi dari pembayaran hutang pihak pertama kepada pihak kedua.⁴⁰

Dalam perbankan syari'ah, *hiwālah* digunakan dalam beberapa produknya, skema aplikasi akad hiwālah pada Lembaga Keuangan Syari'ah adalah sebagai berikut :



Gambar : 2.2

Skema Akad *Hiwālah* dalam buku Ismail, *Perbankan Syari'ah*.

Keterangan :

- Muḥīl* menyuplai barang kepada *muḥal* (pembeli).
- Setelah *muḥīl* mengirim barang kepada *muḥal*, namun *muḥal* tidak mampu melakukan pembayaran, oleh karena itu *muḥīl* menyerahkan *invoice* kepada *muḥal* ‘alaih.

⁴⁰ Ibid., 223

hutang kepada Lembaga Keuangan Konvensional (LKK) menjadi dua macam, yaitu :

1. Hutang pokok plus bunga, dapat menggunakan akad *qard* karena alokasi penggunaan akad *qard* tidak terbatas, termasuk untuk menalangi hutang yang berbasis bunga.
2. Hutang pokok, dapat menggunakan akad *hiwālāh* atau pengalihan hutang karena *hiwālāh* tidak bisa digunakan untuk menalangi hutang yang berbasis bunga.⁴²

Akad *qard* dan *hiwālāh* digunakan untuk melunasi hutang nasabah kepada Lembaga Keuangan Konvensional (LKK), kemudian langkah berikutnya Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) dapat melakukan akad baru dengan nasabah, dengan akad IMBT (*Ijarāh Munntahiya bit Tamlik*) agar menghindari terjadinya *bai' al-inah* yang merupakan salah satu akad jual beli yang dilarang dalam syari'ah.

⁴² Ibid., 249.